

**ANALISIS DAMPAK PENUNDAAN DANA ALOKASI UMUM
DAN PENGURANGAN MANDIRI DANA ALOKASI KHUSUS
PADA KINERJA PEMERINTAH DAERAH:
STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nugroho Purbo Pambudi
Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada
Email: nugrohopurbo@gmail.com

INTISARI

Problematika keuangan merupakan permasalahan mendasar yang dihadapi setiap organisasi. Pada tahun 2016 Pemkab Gunungkidul menghadapi permasalahan keuangan saat adanya kebijakan penundaan penyaluran DAU dan pengurangan mandiri DAK. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan respons Pemkab Gunungkidul saat menghadapi permasalahan keuangan tersebut dan menganalisis lebih jauh konsekuensinya terhadap kinerja dan rencana pembangunan pemda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi peneliti lain dan referensi bagi pemda saat menghadapi kondisi sejenis. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan beberapa butir utama berikut. Pengurangan pendapatan dana perimbangan, yaitu DAU dan DAK, menjadi permasalahan keuangan bagi Pemkab Gunungkidul. Penanganan pengurangan anggaran pada Pemkab Gunungkidul berupa sumber dana alternatif dan efisiensi anggaran. Efisiensi dicapai dengan cara perencanaan prioritas dan melepaskan kewenangan. Pemkab Gunungkidul lebih efisien mencapai kinerjanya. Dari enam belas indikator kinerja sasaran strategis, realisasi kinerja lima belas sasaran strategis dikategorikan sangat berhasil dan realisasi satu sasaran strategis dikategorikan cukup berhasil. Realisasi keuangan dan realisasi fisik Pemkab Gunungkidul tahun 2016 merupakan realisasi tertinggi sepanjang empat tahun terakhir. Realisasi keuangan Pemkab Gunungkidul tahun 2016 sebesar 93,85% dari anggarannya. Realisasi fisik Pemkab Gunungkidul tahun 2016 sebesar 96,74% dari target 100,00%.

Kata kunci: DAU, DAK, pemerintah daerah, problematika keuangan, sumber dana alternatif, efisiensi anggaran, kinerja

**ANALYSIS OF THE IMPACTS OF THE DELAY OF THE GENERAL ALLOCATION FUND (DAU) AND THE SELF-BLOCKING OF THE SPECIAL ALLOCATION FUND (DAK) ON THE PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENTS
(A STUDY ON THE REGENCY GOVERNMENT OF GUNUNGKIDUL)**

Nugroho Purbo Pambudi
Magister of Accounting Program
Faculty of Economics and Business
Universitas Gadjah Mada
Email: nugrohopurbo@gmail.com

ABSTRACT

Financial problem is the basic problem faced by every organization. On 2016, Gunungkidul Regency also face this financial problem when policy about postponing general allocation fund distribution and the reduction of independent special allocation fund. Aims of this research is to describe respond of Gunungkidul regency when face that financial problem and analize further the consequences of those problems to the government performance and development planning. Result of this research hopefully can contribute in adding references to other researcher and local government when face similar conditions. This research using qualitative research and resulted several main points.

Reduction of fiscal balance transfer from central government to local government in form of general allocation fund and special allocation fund become a financial problem for Gunungkidul Regency. Alternative fund resources and budget efficiency used to overcome financial problems happened in Gunungkidul Regency. Efficiency done by priority planning unhold some authority so that Gunungkidul Regency can be more efficient to achieve its performance. From sixteen strategic performance indicators, lima belas strategic performance is successful and one strategic performance is quite successful. Actual and financial realization in Gunungkidul Regency on 2016 was the highest realization in the last four years. Financial realization of Gunungkidul regency on 2016 was 93,85% from its budget and actual realization of Gunungkidul regency on 2016 was 96,74% from its target.

Keywords: general allocation fund, special allocation fund, local government, financial problems, alternative fund resources, budget efficiency, performance